

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1 Bursa Efek Indonesia**

##### **2.1.1 Sejarah Singkat**

Bursa efek atau bursa saham adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang telah terdaftar di bursa. Bursa efek bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama bagi permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. Pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak masa kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintahan kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

##### **2.1.2 Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia**

**Visi :**

“Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia.”

**Misi :**

“Menciptakan infrastruktur pasar keuangan yang terpercaya dan kredibel untuk mewujudkan pasar yang teratur, wajar, dan efisien, serta dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan melalui produk dan layanan yang inovatif.”

**2.2 Profil Perusahaan**

Dalam penelitian yang dilakukan ini objek penelitiannya ialah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah tercatat di BEI dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Selama masa penelitian, dari 20 perusahaan yang menjadi populasi, hanya diambil 15 perusahaan yang sesuai kriteria. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi:

**2.2.1 PT Adhi Karya (Persero) Tbk**

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk adalah perseroan bidang konstruksi milik Negara serta menjadi perusahaan milik negara pertama yang menjual sahamnya ke publik. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1960 yang pada mulanya dikenal dengan nama “rchitecten-Ingenicure-en Annemersbedrijf Associatie Selle en de Bruyn, Reyerse en de Vries N.V” dengan kepemilikan oleh Belanda. Namun, pada 11 Maret 1960, perusahaan tersebut dinasionalisasi untuk mendorong pembangunan infrastruktur Indonesia.

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk menjadi organisasi penyedia layanan di sektor konstruksi, layanan konsultasi juga teknik, *sourcing*, manufaktur, teknologi informasi, real estate dan agribisnis, jika dilihat dari anggaran dasar perusahaan.

Pada tanggal 1 Juni 1974, PN Adhi Karya merubah statusnya jadi perseroan (PT) melalui persetujuan dari Menteri Kehakiman RI. Selanjutnya di tanggal 8 Maret 2004, Bapepam-LK menyatakan kalau PT Adhi Karya telah berhasil menerbitkan saham sebanyak 441.320.000 dengan jenis seri B, nilai nominalnya Rp100/saham, lalu harga penawaran yang terbentuk Rp250 per saham, kode sahamnya ADHI.

Pemerintah Republik Indonesia merupakan mayoritas pemilik modal dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai pengendali/*controller* memiliki rasio saham sebesar 51%. Kepemilikan saham lainnya adalah 49% dari publik, termasuk orang-orang domestik sebesar 16,19%, reksa dana sebesar 11,18%, asuransi sebesar 3,53%, dana pensiun sejumlah 3,31%, perusahaan perseroan terbatas sejumlah 1, 18%, dan yayasan sebesar 0,36%, serta koperasi sekitar 0,05%. Pada saat yang sama, perusahaan asing (13,10%) dan individu asing (0,11%) memiliki saham.

### **2.2.2 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk berdiri sejak 5 Juli 1946. Perusahaan ini bergerak dalam bidang layanan perbankan yang berkaitan dengan sektor komersial, yakni bank komersial (korporasi, menengah dan kecil), bank kredit konsumen, dan bank internasional serta Kementerian Keuangan Keuangan.

Berdasar pada PP Pengganti UU No. 2 Tahun 1946 yang dirilis pada 5 Juli 1946 “Bank Nasional Indonesia” ialah nama bank sentral pertama di Indonesia yang sekarang menjadi PT Bank Nasional Indonesia. BNI juga dianugerahi sebuah status yakni Bank Umum Negara melalui UU No.17 Tahun 1968. BNI berfungsi sebagai bank yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan perekonomian rakyat dan

berkontribusi dalam pembangunan nasional. Status hukum dari BNI berubah menjadi bentuk perseroan terbatas pada tanggal 29 April 1992.

Bapepam-LK memberi pernyataan efektif pada 28 Oktober 1996, yang memberi pernyataan bahwa PT Bank Nasional Indonesia berhasil menyelenggarakan penawaran umum perdana (IPO) pada saham seri B dengan kode BBNI dengan nilai nominalnya Rp500/saham, kemudian harga penawarannya Rp850/saham.

Pemerintah Republik Indonesia saat ini memiliki 60% saham BNI, kemudian 40% selebihnya dipegang investor umum, dan lembaga nasional maupun internasional. BNI kini berperan jadi bank negara terbesar keempat di Indonesia dalam hal jumlah neraca, seluruh kredit dan jumlah total penyedia pihak ketiga.

### **2.2.3 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdiri sejak 16 Desember 1895 dengan sebutan "*Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren*". Kemudian, semenjak 18 Desember 1968, nama tersebut resmi ditetapkan sebagai Bank Rakyat Indonesia, yang kemudian BRI dijadikan perseroan terbatas dengan 100% saham yang dimilikinya milik Pemerintah Republik Indonesia.

Ruang lingkup kegiatan bisnis PT Bank Rakyat Indonesia menurut Anggaran Dasar Perusahaan ialah ikut serta dalam pelaksanaan serta mendukung program juga strategi dari pemerintah dalam bidang perekonomian pembangunan nasional secara umum, dan pada khususnya menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan.

Bapepam-LK telah memberikan izin kepada PT Bank Rakyat Indonesia dalam menyelenggarakan penjualan perdana saham (IPO) sejumlah 3.811.765, memperoleh

harga nominalnya Rp500,-/saham, kemudian memperoleh harga penjualan seharga Rp875,-/saham. Semenjak 10 November 2003, saham BRI dicatatkan ke BEI dengan lambang BBRI.

Mayoritas pemilik modal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yakni dipegang pihak Pemerintah sebanyak 56,75%. Lalu 43,25% sisanya didapatkan masyarakat umum yang terdiri dari 9,46% dimiliki oleh investor domestik dan 33,76% oleh investor asing

#### **2.2.4 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Perusahaan ini berdiri semenjak 9 Februari 1950. BTN memiliki unit bisnis yang selaras dalam kebijakan anggaran dasarnya yakni meliputi operasional perbankan konvensional maupun perbankan syariah. BTN yang dahulu bernama “*Postspaarbank*” ini dibentuk tahun 1897, yang kemudian diubah namanya oleh pemerintah Indonesia menjadi Bank Tabungan Pos pada era pasca kemerdekaan sekitar 1950. Selanjutnya tahun 1963, berubah lagi menjadi Bank Tabungan Negara (BTN).

Semenjak 8 Desember 2009, PT BTN memperoleh keterangan yang sah dari Bapepam-LK yang menyatakan jika BTN bisa melaksanakan penawaran umum perdana (IPO) dalam jenis saham seri-B ke publik sejumlah 2.360.057.000, memperoleh harga nominalnya yakni Rp500,-/saham, dan memperoleh harga jualnya Rp800/saham. Saham kode BBTN diluncurkan BEI tanggal 17 Desember 2009.

Mayoritas efek (saham) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dipegang Pemerintah Republik Indonesia sebesar 60,04%. Kemudian saham sisanya sebesar

39,96%, dimiliki oleh publik diantaranya yakni investor perorangan domestik sebesar 2,43%, internal perusahaan (karyawan) sebesar 1,00%, dana investasi 6,36%, perusahaan asuransi sebesar 3,39%, pensiunan 1,67%, perseroan terbatas sebesar 2,29%, pihak yayasan 0,21% yang terakhir koperasi sebesar 0,01%. Kemudian, pihak asing memiliki sekitar 22,58% saham.

### **2.2.5 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Dimulai semenjak 2 Oktober 1998, Bank Mandiri dibentuk menjadi niat pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi perbankan. Kemudian, sejak bulan Juli 1999, empat bank milik nasional antara lain; Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, serta Bank Pembangunan Indonesia digabungkan menjadi Bank Mandiri. Ruang lingkup kegiatan usaha Bank Mandiri menurut kebijakan anggaran dasarnya yakni menjalankan bisnis di sektor perbankan.

PT Bank Mandiri menerima pernyataan yang sah oleh Bapepam-LK yang memungkinkan dalam melakukan penjualan perdana saham (IPO) sebanyak 4 milyar lembar jenis saham seri-B dengan harga nominalnya yakni Rp500/saham serta memperoleh harga penjualan Rp675/saham. Sejak 14 Juli 2003, saham tersebut dicatatkan di BEI dengan kode BMRI.

Mayoritas saham dari PT Bank Mandiri dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yang kepemilikannya sebanyak 60,61%. Kemudian selebihnya menjadi saham milik masyarakat umum sebesar 39,96%, diantaranya terbagi atas 9,04% kepemilikannya atas masyarakat domestik, lalu 30,35% dimiliki oleh pemegang saham asing.

### **2.2.6 PT Jasa Marga (Persero) Tbk**

Organisasi bisnis yang dibentuk oleh pemerintah semenjak Maret tanggal 1 bulan 1978, yang memiliki tugas utama yaitu melakukan perencanaan, pembangunan, pengoperasian serta pemeliharaan jalan tol beserta prasarana terkait sehingga jalan tol mampu berperan menjadi akses transportasi bebas hambatan yang menyediakan keuntungan bagi penggunaannya dibandingkan jalan biasa. Selain itu, kegiatan sekunder atau penunjang dari PT Jasa Marga yaitu mengembangkan properti di sekitar lorong jalan tol, mengembangkan layanan pada usaha di bidang sarana transportasi, mendistribusikan material, mengembangkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan pada lorong jalan tol, serta menyediakan layanan pembangunan, memelihara dan mengoperasikan jalan tol.

PT Jasa Marga mendapat pernyataan yang sah dari BAPEPAM-LK pada tanggal 1 November 2007 sehingga dapat menjalankan penjualan perdana efek (IPO) untuk publik sejumlah 2.040.000.000 saham Seri B yang memiliki harga nominalnya yakni Rp500/saham serta memperoleh nilai penawarannya sebesar Rp1.700/saham. Saham itu mulai tercatat di BEI sejak 12 November 2007 yang diberi kode JSMR.

Mayoritas modal dari PT Jasa Marga Tbk dimiliki oleh pihak Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan presentase sebesar 70%. Kemudian, 30% saham sisanya dimiliki oleh beberapa pihak diantaranya pemodal nasional sebesar 21,22% dan pemodal asing sebesar 8,78%.

### **2.2.7 PT Kimia Farma (Persero) Tbk**

Kimia Farma semula dibentuk pemerintah kolonial sejak tahun 1817 yang disebut “*NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co*”, kemudian pada 1958 oleh pemerintah Indonesia dinasionalisasikan dan dilebur menjadi Perusahaan Negara Farmasi (PNF). Selanjutnya pada 16 Agustus 1971, PNF diubah menjadi bentuk badan hukum perseroan terbatas yang kemudian berganti nama menjadi PT Kimia Farma (Persero). Menurut kebijakan perusahaan dalam Anggaran Dasar Perseroan menjelaskan bahwa ruang lingkup usaha PT Kimia Farma yaitu menyediakan barang/jasa dengan kualitas tinggi dalam bidang kimia, farmasi, biologi, kesehatan, dan makanan.

PT. Kimia Farma telah mendapat pernyataan yang sah dari Bapepam-LK saat 14 Juni 2001 sehingga dapat mengeluarkan saham ke publik sebanyak 500 juta jenis saham seri B harga nominalnya yakni Rp100/saham serta memperoleh nilai penawarannya sebesar Rp200/saham. Perdagangan efek tersebut mulai tercatat di BEI pada tanggal 4 Juli 2001 yang diberi kode KAEF.

Seperti BUMN lainnya, mayoritas saham dari PT Kimia Farma dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan presentase kepemilikan sebesar 90,03%. Maka saham sisanya 9,97% dimiliki oleh investor umum yang terbagi atas investor dalam negeri dengan presentase 9,86% dan investor internal perusahaan yaitu pihak manajer dan karyawan sebesar 0,11%.

### **2.2.8 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk**

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) berawal dari sebuah perusahaan gas swasta milik Belanda yang lebih dikenal dengan “*L.J.N Eindhoven & CO Gravenhage*” yang berdiri tahun 1859, kemudian sejak tanggal 13 bulan Mei 1965, organisasi tersebut ditetapkan jadi perusahaan milik negara yang biasa dikenal sampai sekarang sebagai “Perusahaan Gas Negara”, hal ini berbasis pada peraturan pemerintah Republik Indonesia. Menurut kebijakan anggaran dasar perusahaan menjelaskan jika bidang bisnis PT PGN meliputi merencanakan, membangun, serta mengembangkan usaha di sektor gas bumi. Selain itu PT PGN juga melakukan kegiatan usaha tambahan yang berhubungan erat dengan kegiatan usaha utamanya.

Bapepam-LK mengeluarkan pernyataan efektif kepada PT PGN pada 5 Desember 2003 sehingga dapat melaksanakan penawaran umum perdana (IPO) dengan 1.296.296.000 saham yang diberi harga nominalnya yakni Rp500/saham, lalu memperoleh harga penjualannya sebesar Rp1.500/saham. PGN mulai mencatatkan perdagangan efeknya di BEI mulai tanggal 15 Desember 2003 yang diberi lambang PGAS.

PT PGN memiliki pemegang saham mayoritas dengan presentase kepemilikannya sebesar 56,96% yakni dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. Kemudian, sisa saham sebesar 43,04% dimiliki oleh masyarakat umum atau publik yang terbagi atas investor dalam negeri sebesar 0,04% dan badan usaha sebesar 30,03%. Selain itu, badan usaha luar negeri sebesar 10,38% serta investor luar negeri 2,59%.

### **2.2.9 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk**

Organisasi bisnis yang pada mulanya dibentuk biasa dikenal “NV Pembangunan Perumahan” pada tanggal 26 Agustus 1953, kemudian sejak 1961 beralih nama jadi PN (Perusahaan Negara) Pembangunan Perumahan. Selanjutnya menurut PP No.39 tahun 1971, PN Pembangunan Perumahan melakukan perubahan status jadi PT PP (Persero). Perusahaan ini memiliki kegiatan usaha inti yaitu melakukan usaha di bidang jasa konstruksi meliputi pembangunan gedung, hotel dan infrastruktur lainnya seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).

PT PP (Persero) mendapatkan pernyataan yang sah oleh Bapepam-LK pada tanggal 29 Januari 2010 sehingga dapat melaksanakan penawaran umum perdana saham (IPO) dengan 1.038.976.500 lembar efek yang memiliki nilai nominalnya Rp100/saham. PT PP ini mulai mencatatkan perdagangan efeknya di BEI pada 9 Februari 2010 yang diberi kode PTPP. Mayoritas saham dari PT Pembangunan Perumahan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sebesar 51%. Lalu, saham lainnya dimiliki oleh pihak internal perusahaan yaitu karyawan sebesar 0,10% dan masyarakat umum dengan presentase sebanyak 48,9%.

### **2.2.10 PT Bukit Asam (Persero) Tbk**

Perusahaan Tambang Batu Bukit Asam yang biasa disebut dengan PT Bukit Asam ini mulai berdiri 2 Maret 1980. Asal usul panjang organisasi bisnis ini mulanya pada 1938 dibawah kekuasaan kolonial Belanda mulai melakukan penambangan bawah tanah guna kepentingan komersial. Kemudian, setelah berakhirnya kekuasaan kolonial pada tahun 1950, para karyawan Indonesia menuntut untuk merubah status

pertambangan menjadi milik nasional, alhasil pemerintah Republik Indonesia kemudian menyetujui adanya pembangunan Perusahaan Nasional Pertambangan Arang Bukit Asam (PN TABA). Setelah itu, mulai 1 Maret 1981 “PN TABA” berganti statunya ke bentuk perseroan terbatas yang sampai sekarang dikenal sebagai PT Bukit Asam.

Bidang usaha dari PT Bukit Asam berhubungan dengan kegiatan penambangan batubara, pendanaan jasa pertambangan, usaha menjual briket, serta kegiatan bisnis yang meliputi peninjauan mineral umum khususnya batubara, penelitian, penambangan, pemurnian, transportasi, serta pemrosesan lanjutan seperti pengolahan batubara.

Semenjak tanggal 23 Desember 2002, PT Bukit Asam mulai melakukan perdagangan efek secara terbuka melalui Bursa Efek dengan diberi kode PTBA, harga saham perdana yang dicatatkan saat itu seharga Rp575 per saham. Pemerintah Negara Republik Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas yang memegang 65,02% saham dari PT Bukit Asam, lalu pihak internal perusahaan memiliki 8,51% saham, dan pemegang saham lainnya dimiliki oleh masyarakat dengan kepemilikan 26,47%.

#### **2.2.11 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk**

PT Semen Baturaja menjadi organisasi bisnis yang berjalan dalam sektor industri persemenan, yang meliputi usaha manufaktur, distribusi, dan jasa terkait lainnya dalam lingkup bidang persemenan. PT Semen Baturaja berlokasi utama di

Baturaja, Sumatra Selatan sehingga saat ini penjualan semen dari perusahaan ini dipasarkan di sekitar wilayah Sumatra bagian selatan serta di wilayah Bengkulu.

Semen Baturaja dibentuk pada 14 November 1974, sebagai PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) oleh PT Semen Gresik yang menguasai 45 persen perusahaan, lalu ada PT Semen Padang dengan 55 persen kepemilikannya. Setelah itu, sejak 9 November 1979 perusahaan Semen Baturaja berubah status menjadi berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dengan 88 persen modalnya didapatkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, lalu diikuti dengan PT Semen Padang mempunyai 7 persen dan PT Semen Gresik ada 5 persen modalnya. Selanjutnya pemerintah membeli seluruh modal perseroan pada tahun 1991

PT Semen Baturaja mendapat pernyataan yang sah oleh OJK sehingga mampu mengadakan penjualan perdana saham (IPO) dengan saham sejumlah 2.337.678.500 yang memiliki harga nominalnya Rp100/saham lalu memperoleh nilai penawaran seharga Rp560/saham. Saham dengan kode SMBR tersebut mulai tercatat dalam BEI sejak 28 Juni 2013. Setelah tercatat di BEI, mayoritas saham PT Semen Baturaja dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan presentase kepemilikan 75,51%, sisanya dimiliki oleh investor eksternal yang terdiri dari investor perorangan dalam negeri sebesar 5,52%, dana pension 4,84%, pihak asuransi 9,19%, internal perseroan 0,19%, dan reksadana 4,47%, serta kepemilikan saham asing sebesar 0,27%.

#### **2.2.12 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk**

Organisasi bisnis ini pada mulanya disebut dengan PT Semen Gresik (Persero) yang berdiri pada tanggal 7 Agustus 1957. PT Semen Indonesia telah menjadi badan

usaha Negara yang bergerak dalam sektor semen juga menjadi pendukung pembangunan nasional semenjak awal kemerdekaan. Menurut kebijakan anggaran dasar perusahaan, lingkup bisnis perseroan berupa seluruh kegiatan dalam industri semen.

PT Semen Indonesia pada tanggal 4 Juli 1991 melakukan pencatatan dan mendapat pernyataan yang sah menurut Bapepam-LK sehingga dapat menjual saham secara perdana (IPO) serta menjadi emiten BUMN terdahulu dalam menjual sahamnya secara publik pada BEI sejumlah 40 juta lembar efek, dengan harga nominalnya RP1.000/saham serta memperoleh nilai penjualannya sebesar RP7.000/saham. Saham dengan kode SMGR telah tercatat dalam BEI pada tanggal Juli 1991.

Struktur kepemilikan saham dari PT Semen Indonesia meliputi Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemilik modal terbanyak yang memperoleh 51,01% dari total keseluruhan, lalu kepemilikan pemodal dalam negeri sebesar 48,99%, terakhir sisanya sebesar 14% dimiliki oleh “*Camex S.A. De C.V.*” adalah bisnis semen global dari Mexico melalui penawaran terbuka.

### **2.2.13 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk**

PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom memiliki sejarah panjang yakni pada saat itu pemerintah kolonial memasang layanan informasi berupa telegram elektromagnetik pertama yang pernah ada di Indonesia yang telah mampu menghubungkan Batavia atau yang sekarang disebut kota Jakarta menuju Bogor, sehingga menjadikan tanggal 23 Oktober sebagai hari lahir berdirinya perusahaan

Telkom. Selanjutnya, semenjak tahun 1961 pemerintah Indonesia membentuk Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Tetapi, pada 6 Juli 1965 Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memisahkan sektor pos dan telekomunikasi menjadi PN Pos, dan PN Telekomunikasi, sehingga mulai dari kejadian itu menjadikan tanggal tersebut menjadi hari lahirnya Telkom. Kemudian tahun 1991 Telkom berganti status hukumnya sebagai berbadan hukum perseroan terbatas. Sejak 1995, PT Telkom memulai penawaran umum perdana saham (IPO) mempunyai kode TLKM kepada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, serta melakukan pendaftaran saham ke NYSE dan LSE, dan melakukan penjualan saham tanpa listing di Bursa Efek Tokyo.

Lingkup kegiatan bisnis dari PT Telkom ini berubah menyesuaikan perubahan zaman, perkembangan teknologi, informasi, dan digital. Menurut kebijakan perseroan mengenai anggaran dasar menjelaskan bahwa kegiatan usaha PT Telkom ialah menghadirkan layanan telekomunikasi dan jaringan, informatika, serat mengoptimalkan sumber daya yang terdapat di perusahaan.

Struktur kepemilikan saham dari PT Telekomunikasi Indonesia terdiri atas beberapa pihak yakni Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki total saham sebanyak 51,19%. Lalu sebagian lainnya 48,81% dipegang oleh investor umum yang terdiri dari pemegang saham dalam negeri sebesar 0,56%, institusi sebesar 8,17%, serta kepemilikan modal asing sebesar 40,08%.

#### **2.2.14 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**

PT Wijaya Karya biasa dikenal WIKA ini berdiri pada 29 Maret 1961 dibentuklah “PN Widjaja Karja” serta peleburan bisnis pembangunan kepunyaan kolonial Belanda “*NV Technische Handel Maatschappij en Bouwbedrijf Vis en Co.*” kemudian pada 1972, “PN Widjaja Karja” mengalami pergantian nama dan mengalami perubahan bentuk menjadi perseroan dengan nama “PT Wijaya Karya (Persero)”.

PT WIKA ialah sebuah bisnis kepunyaan negara yang bekerja di sektor layanan konstruksi atau pembangunan. Unit usaha dari perusahaan ini meliputi unit teknik sipil, konstruksi, fasilitas perumahan, produksi beton dan logam, konstruksi industri, dan bagian penjualan. Berdasarkan pada kebijakan anggaran dasar perseroan menjelaskan bahwa PT Wijaya Karya 6 strategi unit bisnis yang terdiri dari bekerja di sektor konstruksi, mesin, produksi beton, *real estate*, serta industri lain berhubungan dengan *Engineering Procurement Construction* (EPC).

Pada 11 Oktober 2007, PT Wijaya Karya menyelesaikan penjualan perdana saham (IPO) sebanyak 1.846.154.000 jenis Seri-B, memiliki harga nominalnya yakni Rp100,-/saham, kemudian memperoleh harga penjualannya Rp420,-/saham. Saham kode WIKA ini mulai tercatat di BEI semenjak 29 Oktober 2007. Setelah berhasil menjual efek ke BEI mayoritas saham dari PT Wijaya Karya dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan presentase sebesar 65,05%, lalu saham lainnya dimiliki oleh investor umum dengan perolehan sebesar 34,95%.

### **2.2.15 PT Waskita Karya (Persero) Tbk**

Organisasi bisnis yang berdiri pada 1 Januari 1961 ini, semulanya bisnis milik Belanda “*Volker Aannemings Maatschappij NV*”, kemudian pada tahun 1961 diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Setelah itu pada tahun 1973, Waskita Karya merubah statusnya jadi berbadan hukum perseroan terbatas Waskita Karya (Persero). Berdasarkan kebijakan mengenai anggaran dasar perseroan pada pasal 3 menjelaskan bahwa kegiatan bisnis PT Waskita Karya meliputi melakukan bisnis di bidang jasa konstruksi, industri kebutuhan konstruksi, penyedia layanan penyewaan, agro industri, dan menyediakan jasa konsultasi dalam meningkatkan keterampilan konstruksi sambil tetap mengingat konsep dasar perseroan terbatas.

PT Waskita Karya telah mampu memperjualkan saham perdananya mulai 10 Desember 2012, total saham yang ditawarkan sebanyak 3.082.315.000 lembar jenis saham Seri B, mempunyai nilai nominalnya Rp100/saham kemudian memperoleh harga penjualan seharga Rp380/saham. Saham berkode WSKT ini tercatat di BEI sejak 19 Desember 2012.

Struktur kepemilikan modal dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk terdiri atas banyak pihak pemegang saham, yakni Pemerintah Negara Republik Indonesia yang memegang 66,04% sehingga menjadi pemegang saham mayoritas dari PT Waskita karya. Sedangkan saham sebesar 33,96% sisanya terbagi atas dua pihak yaitu investor perorangan dalam negeri sejumlah 27,72% dan investor asing memiliki 6,24% saham.